



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governancedan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment*. Paradigma ini mengarahkan peran aparat pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan *good government* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau



kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kecamatan Cibiru selaku unsur pembantu pimpinan. dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Cibiru sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung. capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah. melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota. Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat. jelas. terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna. berhasil guna. bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi. kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi. kolusi dan nepotisme. maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum. azas tertib penyelenggaraan negara. azas kepentingan umum. azas keterbukaan. azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibiru Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja. realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Cibiru

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cibiru pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana batas Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :

- . Sebelah utara dengan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
- . Sebelah timur dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- . Sebelah selatan dengan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.
- . Sebelah barat dengan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Dan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan juga kelurahan di masing-masing kecamatan se-Kota Bandung. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Palasari.
2. Kelurahan Cipadung.
3. Kelurahan Pasir Biru.
4. Kelurahan Cisarupan.

Kecamatan Cibiru meliputi luas wilayah 652,930 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak sebanyak 61.683 jiwa dan 17.627 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4 (empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 53 Rukun Warga, dan 283 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cibiru terdiri dari pemukiman. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan dan pertanian

## 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

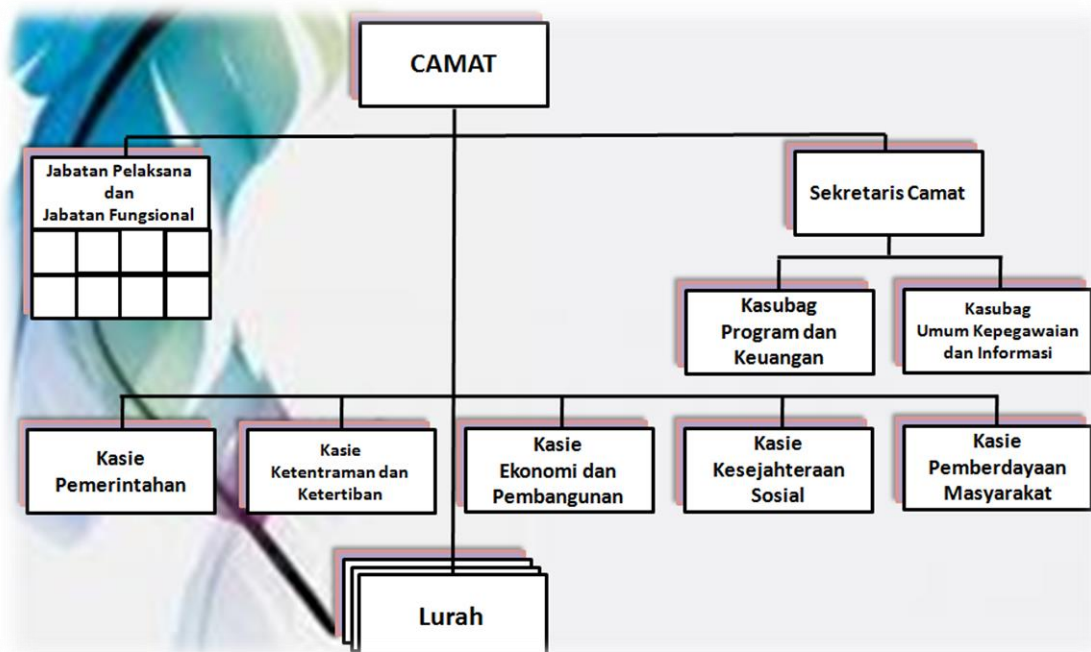
UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota / Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut. Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Cibiru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD). Kecamatan Cibiru mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Cibiru mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Cibiru dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh apatur dibawahnya sesuai struktur organisasinya :

## STRUKTUR KECAMATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2018



### 1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan



komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum. isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang. indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung. sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah. aman. cepat. efisien. dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan. pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja. pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.



Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibiru. sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibiru. sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

### **1.5. Landasan Hukum**

LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara REVISI Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

## 1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1. Perencanaan Strategis**

#### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran**

Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Nomor : 005 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)





RPJMD. Forum SKPD. sehingga Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya. Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD 2013-2018 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017* pada lampiran halaman 397 sehingga tujuan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dibentuknya SKPD tersebut dalam mendukung ketercapaian visi dan misi RPJMD 2013-2018. Dimana Visi dan misi RPJMD 2013-2018 sebagai berikut :

Visi :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Misi :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang. pembangunan infrastruktur. dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif. bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri. berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh. maju. dan berkeadilan.

## 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik. terukur. dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat



dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah Kota Bandung juga melakukan REVISI terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan REVISI dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan REVISI terhadap Perencanaan Strategis. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil REVISI tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru 2018.



# LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

**Tabel 2.1.1**

Tujuan. Sasaran. Indikator Dan Target Kinerja sebelum revisi dan setelah revisi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	80	82.5	80.5	82.86
						Persentase Keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100		
						Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai	825	850	850		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	60	95	96		
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	60	95	96		
						Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	25	75	100		
						Persentase RW Juara	%	20	50	60		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	60	70	75		



# LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

		-	-	-			Rasio Anggota Linmas	Rasio	1 : 0.7	1:1	1:1		
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%				75	85
2.	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cibiru		Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai	Nilai	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	51	60	60		
					Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100				
					Tertib administrasi barang /asset daerah	%							



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

### **2.1.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru ditetapkan melalui Keputusan Camat Cibiru Nomor : 050-Kec.Cbu Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bersamaan dengan revisi rencana strategis Kecamatan juga dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Hanya ada dua indikator kinerja yang dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kecamatan.

Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Revisi beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.



# LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

**Tabel 2.1.2**

Indikator Kinerja Utama. Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil REVISI Kecamatan Cibiru Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVISI		SETELAH REVISI								
				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	TARGET PADA TAHUNAN					
									2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	75	80	82.5	80.5	82.86	
							Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	100	100	100		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Kategori	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	60	95	96			
						Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	60	95	96			
						Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	25	75	100			



# LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

						Persentase RW Juara	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Rencana Aksi Walikota Bandung	20	50	60		
						Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan	65	70	75		
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan				75	85
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Angka								
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rasio Anggota Linmas	Rasio								
2	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cibiru	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai								
				Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%								

BUKAN IKU



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Perjanjian Kinerja Revisi  
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85

Dalam mengantisipasi ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan perlu adanya progres atau perkembangan ketercapaian indikator per-triwulan sehingga perlu dibuat KPI (*Key Performance Indikator*) sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya yang dapat dijadikan pegangan dan dilaporkan dalam LKIP Triwulanan.





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cibiru Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cibiru.

### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

### Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
	Sangat Baik	> 90	
	Baik	75.00 – 89.99	
	Cukup	65.00 – 74.99	
	Kurang	50.00 – 64.99	
	Sangat Kurang	0 – 49.99	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru berdasarkan SK Camat Cibiru Nomor 050-Kec.Cbu Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru berdasarkan SK nomor 050-Kec.Cbu Tahun 2018

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cibiru Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Cibiru Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan	Angka	2	2.03	100.04
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	5	7.3	102.71

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan, dengan capaian kinerja 100.04 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 102.71 %.

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

mencapai visi dan misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan	Angka	82	82.03	100.04
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	85	87.3	102.71

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

### Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

### Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**

### Analisis Pencapaian Sasaran 1

### Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan	Angka	78	73,60	100.82	80		0.00	81	81	100.00	81,5	82,03	100.65	82	82.03	100.04



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cibiru. dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan" adalah sebesar 82.03 dari target sebesar 82 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.04 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan" tahun ini menurun 0.61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.65 tetapi masih melebihi dari target yang telah direncanakan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM) representatif Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100.04 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 100.04 %.

Bila capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :

**Tabel 3.3.9**

Data Perbandingan

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain)  
Tahun 2018

NO	NAMA KECAMATAN	TARGET	IKM	Capaian (%)	Rank IKM	Rank Capaian
1	ANDIR	81,30	82,54	101,53	24	12
2	ANTAPANI	80,50	82,76	102,81	22	7
3	ARCAMANIK	83,50	83,96	100,55	14	18
4	ASTANAANYAR	82,00	83,84	102,24	15	8
5	BABAKAN CIPARAY	82,00	82,14	100,17	26	24
6	BANDUNG KIDUL	82,80	88,61	107,02	2	2





## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

7	BANDUNG KULON	82,15	82,20	100,06	25	27
8	BANDUNG WETAN	81,35	83,75	102,95	16	5
9	BATUNUNGGAL	81,00	81,78	100,96	29	15
10	BOJONGLOA KALER	82,80	83,53	100,88	18	16
11	BOJONGLOA KIDUL	82,00	82,66	100,80	23	17
12	BUAH BATU	84,50	84,59	100,11	7	26
13	CIBEUNYING KALER	84,50	86,28	102,11	4	9
14	CIBEUNYING KIDUL	83,00	84,33	101,60	9	11
15	CIBIRU	82,00	82,03	100,04	27	28
16	CICENDO	81,05	83,68	103,24	17	4
17	CIDADAP	81,75	81,97	100,27	28	22
18	CINAMBO	82,00	84,31	102,82	10	6
19	COBLONG	84,00	84,09	100,11	12	25
20	GEDE BAGE	80,50	89,79	111,54	1	1
21	KIARACONDONG	85,00	86,71	102,01	3	10
22	LENGKONG	83,00	84,14	101,37	11	13
23	MANDALAJATI	84,50	84,53	100,04	8	29
24	PANYILEUKAN	<b>82,86</b>	<b>83,31</b>	<b>100,54</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
25	RANCASARI	82,80	83,03	100,28	21	21
26	REGOL	79,45	83,29	104,83	20	3
27	SUKAJADI	85,75	85,00	99,13	6	30
28	SUMUR BANDUNG	85,00	85,18	100,21	5	23
29	SUKASARI	79,45	79,70	100,31	30	20
30	UJUNG BERUNG	83,00	84,04	101,25	13	14
<b>RATA - RATA</b>			<b>83,92</b>			

Capaian Pengukuran laporan monev IKU Kecamatan

Bila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya IKM Kecamatan Cibiru berada dibawah rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan, capaian IKM Kecamatan Cibiru (82.03) dibawah rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan sebesar 83,92.



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Bila dibandingkan dengan hasil pengukuran nilai Indeks Pelayanan 30 (tiga puluh) Kecamatan lainnya, IKM hasil pengukuran Kecamatan Cibiru 82.03 berada diposisi ke 15 dan masih sama dengan rangking tahun 2017 yang menduduki rangkin ke 15 dari 30 kecamatan. Bila capaian (%) kecamatan Cibiru dengan nilai 100.03% dibandingkan rata-rata capaian IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan maka capaian (%) kecamatan Cibiru menduduki urutan ke 15 pula, capaian IKM Kecamatan Cibiru (82.03) dibawah rata-rata IKM 30 (tiga puluh) Kecamatan menduduki urutan ke 15 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Bandung 83,92.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya tenaga pelayanan non PNS yang dapat mendukung peningkatan pelayanan
2. Tersedianya aplikasi mesin antrian yang dilengkapi dengan pengukuran IKM secara sistem di Kecamatan.

Faktor Penghambat :

1. Capaian pelayanan indeks kepuasan yang belum maksimal dan akurat
2. Kinerja struktural yang masih perlu dimaksimalkan untuk mendokrak pencapaian IKM

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

1. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat akan dilakukan dengan menggunakan sistem yang ada dimesin antrian dengan harapan akan lebih akurat;



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

2. Kegiatan untuk struktural yang didukung anggaran yang ada di DPA dimaksimalkan dengan melakukan penerapan output yang jelas dan terukur pada kegiatan PPTK Struktural sehingga untuk PPTK harus memenuhi target yang telah ditetapkan dan didukung dengan target capaian IKI dari semua unsur ASN.

### Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			0.00			0.00			0.00	75	94,12	125.00	85	87.3	102.71



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 87.3 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.71 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini menurun 22.29 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 125.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 102.71 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 102.71 %.

**Tabel 3.3.1**  
**Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**  
**Kecamatan Cibiru Tahun 2018**

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)			
		RW JUARA	SISKAMLING AKTIF	LKK AKTIF	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Palasari	100	76	100	92
2	Cipadung	47.06	100	100	82.35
3	Pasirbiru	75	100	100	91.67
4	Cisurupan	50	100	100	83.33
RATA RATA PER UNSUR		<b>68.01</b>	<b>93.89</b>	<b>100</b>	<b>87.3</b>
<b>Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>					

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Cibiru



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 4 kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan.

Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW JUARA + % SISKAMLING AKTIF + % LKK AKTIF) dibagi 3

% RW JUARA = RW yang memenuhi kriteria ( 1 dari 5 pengelolaan sampah dan 5 dari 21 roadmap wali Kota) dibagi Jumlah RW di kelurahan tersebut

% SISKAMLING AKTIF = Jumlah RW yang emenuhi 5 kriteria siskamling aktif dibagi Jumlah RW di Kelurahan tersebut

% LKK AKTIF = Jumlah LKK ( PKK, Karang Taruna dan LPM) yang memenuhi 4 kriteria LKK Aktif dibagi

Dari tabel Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terrendah hal ini mencerminkan bervariatif kinerja yang telah dilaksanakan kelurahan di Kecamatan Cibiru.

Data tertinggi pada tabel diatas pada Kelurahan Pasirbiru rata-rata unsur penilaian memiliki nilai yang cukup tinggi dibanding target yang telah ditentukan sehingga dalam hal ini Kelurahan perlu mempertahankan capaian capaian yang telah diraih.

Data terendah pada tabel diatas pada Kelurahan Cipadung dimana dari rata-rata unsur penilaian yang menduduki nilai terendah dan pada RW Juara memiliki nilai yang paling rendah 47,06 % sehingga perlu adanya peningkatan capaian di tahun berikutnya

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 atau tahun sebelumnya capaian Kecamatan Cibiru sebesar 87,3 mengalami penurunan persentase capaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 94.14 %.



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

**Tabel 3.3.6**  
Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)  
Kecamatan Cibiru Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	Kelurahan / Kecamatan	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2017	Capaian Tingkat Pemberdayaan Masyarakat TAHUN 2018	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kelurahan Palasari	90.48	92	1.52
2	Kelurahan Cipadung	96.07	82.35	-13.72
3	Kelurahan Pasibriu	100	91.67	-8.33
4	Kelurahan Cisirupan	90	83.33	-6.67
5	Capaian se-Kecamatan	94.14	87.3	-6.84

Sumber data : Kelurahan di Kecamatan Cibiru

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan dari target nilai akhir renstra 85 dan capaian 87.3 maka capaian kinerjanya mencapai 102.7 %, sehingga perlu adanya review untuk target indeks kepuasan masyarakat baik pada Rencana Strategi (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta IKU Kecamatan Cibiru sebagai perencanaan untuk tahun 2019.

Bila capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 dibandingkan dengan OPD lain (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama maka :



**Tabel 3.3.7**

Data Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat  
Tahun 2018

NO	NAMA SKPD / UNIT KERJA	UNSUR PENILAIAN JUARA			
		Target	Realisasi	Capaian %	Rang King
1	ANDIR	75,00	79,40	105.87	18
2	ANTAPANI	77.50	88,49	114.18	7
3	ARCAMANIK	85,00	84,59	99.52	29
4	ASTANAANYAR	90,00	98,63	109.59	13
5	BABAKAN CIPARAY	78,00	95,08	121.90	4
6	BANDUNG KIDUL	85,00	85,09	100.11	27
7	BANDUNG KULON	75,00	85,00	113.33	9
8	BANDUNG WETAN	77,00	78,70	102.21	24
9	BATUNUNGGAL	78,00	82,61	105.91	17
10	BOJONGLOA KALER	85,00	85,09	100.11	27
11	BOJONGLOA KIDUL	75,50	89,56	118.62	5
12	BUAH BATU	75,00	77,58	103.44	20
13	CIBEUNYING KALER	80,00	92,36	115.45	6
14	CIBEUNYING KIDUL	75,00	82,76	110.35	12
15	CIBIRU	85,00	87,30	102.71	22
16	CICENDO	72.21	89,09	123.38	3
17	CIDADAP	75,00	76,91	102.55	23
18	CINAMBO	79,55	87,10	109.49	14
19	COBLONG	75,00	114,30	152.40	1
20	GEDE BAGE	75,00	98,50	131.33	2
21	KIARACONDONG	80,00	88,69	110.86	11
22	LENGKONG	76,00	86,00	113.16	10



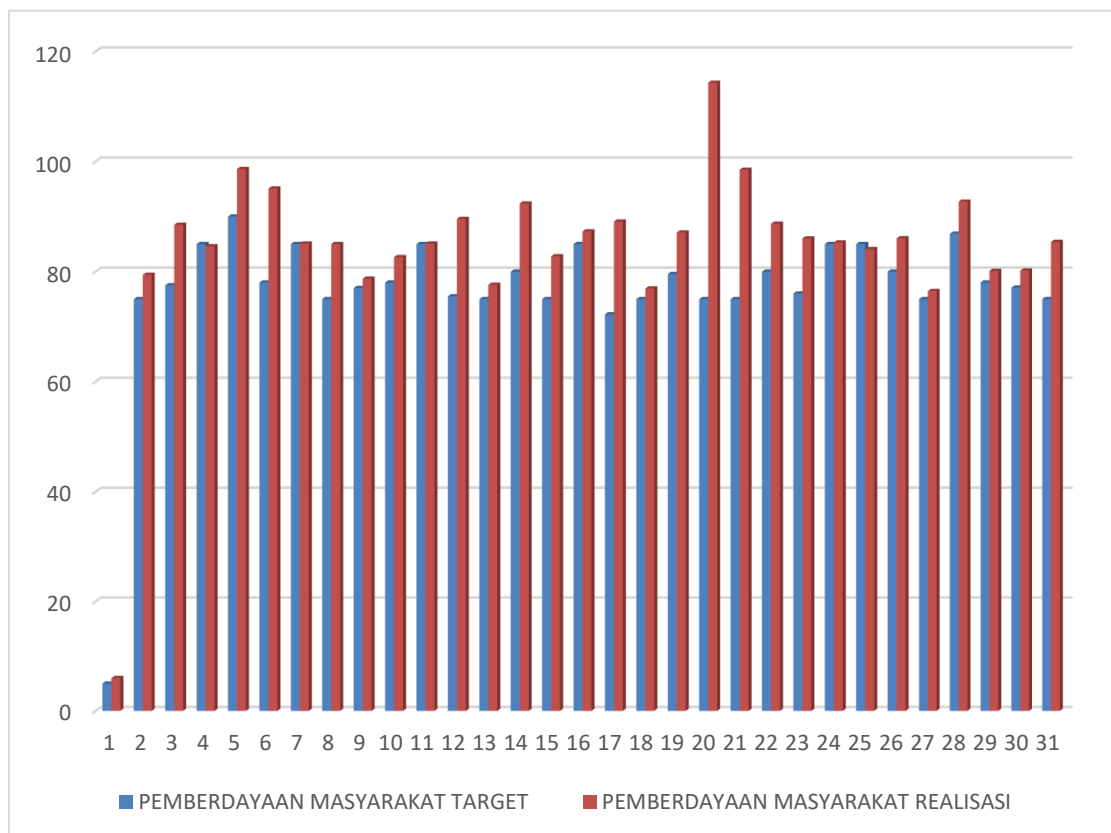
# LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

<b>23</b>	MANDALAJATI	85,00	85,28	100.33	26
<b>24</b>	PANYILEUKAN	85,00	84,07	98.91	30
<b>25</b>	RANCASARI	80,00	86,04	107.55	15
<b>26</b>	REGOL	75,00	76,45	101.93	25
<b>27</b>	SUKAJADI	86.87	92,69	106.70	16
<b>28</b>	SUMUR BANDUNG	78,00	80,12	102.72	21
<b>29</b>	SUKASARI	77,08	80,20	104.05	19
<b>30</b>	UJUNG BERUNG	75,00	85,38	113.84	8

Bagian ORPAD

Grafik 3.3.2

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018







## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Bila melihat tabel dan grafik untuk capaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dibandingkan dengan kecamatan lain bervariasi sehingga dari tabel dapat dilihat menduduki ranking 30. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- Banyaknya RW
- Perencanaan kegiatan

Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Perencanaan sudah terdapat dalam sub kegiatan

Faktor Penghambat :

1. Tidak adanya perubahan Anggaran
2. Lebih memantapkan perencanaan sehingga meminimalisir kesalahan

### **Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1**

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan didukung oleh Program :

No,	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1,	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

2,	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3,	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur(program penunjang)</b>	<b>Output</b> dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4,	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Output</b> program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, <i>Creative District Project</i> , (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, , Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)
5	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>Output</b> program beserta kegiatan didalamnya antara lain Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebudayaan, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebudayaan, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan <i>Zero Waste Home</i> , Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, <i>Septic Tank Communal</i> , Hemat Air dan Daur Ulang, <i>River Green Wall</i> , Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung <i>Green N Clean</i> , Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir, Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

**Tabel 3,3,13**

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	OUTPUT	Target Output	Realisasi Output	(baik/kurang)
1	<b>KECAMATAN CIBIRU</b>			-				
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>793,003,163.28</b>	<b>709,852,071.00</b>	<b>83,151,092.28</b>	<b>Nilai IKM</b>			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,736,485.28	56,501,813.00	<b>9,234,672.28</b>	Jumlah jasa bulanan komunikasi	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23,516,840.00	16,581,900.00	<b>6,934,940.00</b>	jumlah unit kendaraan yang dikelola	44 unit	44 unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,200,000.00	37,200,000.00	-	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22,400,000.00	22,300,000.00	<b>100,000.00</b>	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	36 unit	36 unit	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	55,081,222.00	54,650,900.00	<b>430,322.00</b>	Jumlah penyediaan ATK	70 jenis	70 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,600,360.00	48,806,300.00	<b>794,060.00</b>	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	15 jenis	15 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,712,400.00	5,599,550.00	<b>112,850.00</b>	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	9 jenis	9 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,875,856.00	7,650,000.00	<b>6,225,856.00</b>	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor	4 jenis	2 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,580,000.00	17,463,000.00	<b>3,117,000.00</b>	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	40 jenis	39 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,556,000.00	6,984,000.00	<b>4,572,000.00</b>	Jumlah jenis bahan bacaan	12 jenis	6 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	46,244,000.00	46,054,000.00	<b>190,000.00</b>	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	74 kali	74 kali	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	111,500,000.00	60,060,608.00	<b>51,439,392.00</b>	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	6 kali	
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	330,000,000.00	330,000,000.00	-	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan	12 laporan	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>645,365,047.00</b>	<b>553,835,128.00</b>	<b>91,529,919.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120,395,047.00	111,203,500.00	<b>9,191,547.00</b>	jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	524,970,000.00	442,631,628.00	<b>82,338,372.00</b>	jumlah unit kendaraan yang dikelola	56 unit	56 unit	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>130,020,000.00</b>	<b>120,260,800.00</b>	<b>9,759,200.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75,075,000.00	68,405,700.00	<b>6,669,300.00</b>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	2 jenis	2 jenis	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	54,945,000.00	51,855,100.00	<b>3,089,900.00</b>	Jumlah pakaian dinas hari hari tertentu	2 jenis	2 jenis	
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1,672,648,035.00</b>			<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	29,905,000.00	29,881,000.00	<b>24,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	14 laporan	14 laporan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	182,290,067.00	181,806,652.00	<b>483,415.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19 laporan	19 laporan	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	991,663,440.00	989,596,400.00	<b>2,067,040.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39 laporan	39 laporan	
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	119,388,000.00	116,795,000.00	<b>2,593,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	35 laporan	34 laporan	
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	146,387,000.00	146,387,000.00	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	22 laporan	22 laporan	
	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	203,014,528.00	195,373,500.00	<b>7,641,028.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	64 laporan	64 laporan	
<b>2</b>	<b>KELURAHAN PALASARI</b>							
	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>1,378,081,911.05</b>	<b>1,110,554,034.00</b>	<b>267,527,877.05</b>	<b>Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>			
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	1,152,890,661.05	886,415,784.00	<b>266,474,877.05</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup RW	102 sub kegiatan	88 sub kegiatan	
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	56,223,250.00	55,218,250.00	<b>1,005,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup PKK	21 sub kegiatan	21 sub kegiatan	
	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91,246,000.00	91,216,000.00	<b>30,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup Karang Taruna	20 sub kegiatan	20 sub kegiatan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	77,722,000.00	77,704,000.00	<b>18,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup LPM	9 sub kegiatan	7 sub kegiatan	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>77,790,948.00</b>	<b>68,322,042.00</b>	<b>9,468,906.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,490,525.00	11,991,692.00	<b>8,498,833.00</b>	Jumlah jasa bulanan komunikasi	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	-	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,740,081.00	5,684,000.00	<b>56,081.00</b>	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,958,412.00	14,261,600.00	<b>696,812.00</b>	Jumlah penyediaan ATK	23 jenis	23 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,999,950.00	4,837,150.00	<b>162,800.00</b>	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	47 jenis	47 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,560,380.00	2,551,000.00	<b>9,380.00</b>	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	9 jenis	9 jenis	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor			
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,995,600.00	1,995,600.00	-	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	16 Jenis	16 Jenis	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,200,000.00	1,155,000.00	<b>45,000.00</b>	Jumlah jenis bahan bacaan	2 Jenis	3 Jenis	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	16,246,000.00	16,246,000.00	-	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1,140,399,040.00</b>	<b>1,123,632,700.00</b>	<b>16,766,340.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	8,987,000.00	8,987,000.00	-	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	3 laporan	3 laporan	
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	460,806,640.00	457,807,300.00	<b>2,999,340.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19 laporan	19 laporan	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	496,341,000.00	492,300,000.00	<b>4,041,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	29 laporan	29 laporan	
Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	174,264,400.00	164,538,400.00	<b>9,726,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	51 laporan	50 laporan	
<b>3 KELURAHAN CIPADUNG</b>			-				
<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>1,300,625,430.47</b>	<b>897,542,328.00</b>	<b>403,083,102.47</b>	<b>Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>			
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	1,051,582,930.47	650,075,956.00	<b>401,506,974.47</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup RW	179 sub kegiatan	163 sub kegiatan	
Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	79,802,500.00	78,698,472.00	<b>1,104,028.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup PKK	25 sub kegiatan	25 sub kegiatan	





## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	76,420,000.00	76,402,900.00	<b>17,100.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup Karang Taruna	15 sub kegiatan	15 sub kegiatan	
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	92,820,000.00	92,365,000.00	<b>455,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup LPM	21 sub kegiatan	21 sub kegiatan	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>99,031,374.00</b>	<b>90,756,630.00</b>	<b>8,274,744.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,904,840.00	21,657,130.00	<b>8,247,710.00</b>	Jumlah jasa bulanan komunikasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	-	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,900,000.00	2,900,000.00	-	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	2 unit	2 unit	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,914,118.00	14,911,400.00	<b>2,718.00</b>	Jumlah penyediaan ATK	37 jenis	37 jenis	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,024,786.00	12,009,700.00	<b>15,086.00</b>	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4,018,130.00	4,013,900.00	<b>4,230.00</b>	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	16 jenis	16 jenis	
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,088,000.00	4,088,000.00	-	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor	4 unit	4 unit	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,226,500.00	3,226,500.00	-	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	101 jenis	101 jenis	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	Jumlah jenis bahan bacaan	3 jenis	3 jenis	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	16,555,000.00	16,550,000.00	<b>5,000.00</b>	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	30 laporan	30 laporan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>1,264,030,231.00</b>	<b>1,227,203,880.00</b>	<b>36,826,351.00</b>	<b>Nilai IKM</b>		
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	9,826,000.00	9,826,000.00	-	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	7 laporan	7 laporan
	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	516,668,780.00	516,668,480.00	<b>300.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	23 laporan	23 laporan
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	544,862,451.00	530,757,400.00	<b>14,105,051.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	34 laporan	33 laporan
	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	192,673,000.00	169,952,000.00	<b>22,721,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	27 laporan	26 laporan
<b>4</b>	<b>KELURAHAN PASIRBIRU</b>						
	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>1,168,374,111.47</b>	<b>1,039,445,340.00</b>	<b>128,928,771.47</b>	<b>Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>		
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	932,086,211.47	806,147,440.00	<b>125,938,771.47</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup RW	56 sub kegiatan	54 sub kegiatan
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	51,660,000.00	50,656,300.00	<b>1,003,700.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup PKK	9 sub kegiatan	9 sub kegiatan
	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	98,011,600.00	96,380,100.00	<b>1,631,500.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup Karang Taruna	13 sub kegiatan	13 sub kegiatan
	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	86,616,300.00	86,261,500.00	<b>354,800.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup LPM	7 sub kegiatan	7 sub kegiatan



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>94,938,687.00</b>	<b>87,123,448.00</b>	<b>7,815,239.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,280,700.00	21,152,948.00	<b>7,127,752.00</b>	Jumlah jasa bulanan komunikasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	-	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,000,000.00	6,000,000.00	-	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	5 unit	5 unit	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,238,097.00	15,167,150.00	<b>70,947.00</b>	Jumlah penyediaan ATK	35 jenis	30 jenis	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,050.00	11,989,700.00	<b>10,350.00</b>	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3,255,650.00	3,255,650.00	-	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	5 jenis	5 jenis	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,098,190.00	2,098,000.00	<b>190.00</b>	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 jenis	12 jenis	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,016,000.00	1,416,000.00	<b>600,000.00</b>	Jumlah jenis bahan bacaan	3 jenis	4 jenis	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	16,450,000.00	16,444,000.00	<b>6,000.00</b>	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	12 laporan	
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>1,030,880,678.00</b>	<b>1,017,034,000.00</b>	<b>13,846,678.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	9,223,000.00	8,668,000.00	<b>555,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	5 laporan	5 laporan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	450,458,400.00	450,436,400.00	<b>22,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19 laporan	19 laporan	
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	427,698,078.00	416,537,600.00	<b>11,160,478.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	40 laporan	38 laporan	
	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	143,501,200.00	141,392,000.00	<b>2,109,200.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	68 laporan	68 laporan	
<b>5</b>	<b>KELURAHAN CISURUPAN</b>							
	<b>Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>1,041,770,452.39</b>	<b>843,814,600.00</b>	<b>197,955,852.39</b>	<b>Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>			
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	788,482,677.39	597,396,800.00	<b>191,085,877.39</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup RW	127 sub kegiatan	124 sub kegiatan	
	Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	81,679,900.00	77,657,900.00	<b>4,022,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup PKK	48 sub kegiatan	45 sub kegiatan	
	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	99,097,875.00	96,513,300.00	<b>2,584,575.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup Karang Taruna	9 sub kegiatan	9 sub kegiatan	
	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	72,510,000.00	72,246,600.00	<b>263,400.00</b>	Jumlah sub kegiatan inovatif lingkup LPM	16 Sub kegiatan	10 sub kegiatan	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>84,838,142.00</b>	<b>84,273,611.00</b>	<b>564,531.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,340,000.00	19,799,511.00	<b>540,489.00</b>	Jumlah jasa bulanan komunikasi	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9,600,000.00	9,600,000.00	-	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan	12 jasa bulanan	12 jasa bulanan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4,450,000.00	4,450,000.00	-	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	5 unit	5 unit	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,999,842.00	14,998,700.00	<b>1,142.00</b>	Jumlah penyediaan ATK	53 jenis	53 jenis	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,924,400.00	11,923,500.00	<b>900.00</b>	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3,562,700.00	3,562,700.00	-	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	7 jenis	7 jenis	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,425,200.00	2,425,200.00	-	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	20 jenis	20 jenis	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,236,000.00	1,230,000.00	<b>6,000.00</b>	Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis	5 jenis	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	16,300,000.00	16,284,000.00	<b>16,000.00</b>	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	18 laporan	18 laporan	
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>865,508,160.00</b>	<b>862,061,500.00</b>	<b>3,446,660.00</b>	<b>Nilai IKM</b>			
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	9,545,000.00	9,545,000.00	-	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	5 laporan	4 laporan	
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	391,628,400.00	391,627,500.00	<b>900.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	29 laporan	29 laporan	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	337,890,000.00	334,445,000.00	<b>3,445,000.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	31 laporan	30 laporan	
Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	126,444,760.00	126,444,000.00	<b>760.00</b>	Jumlah sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan	57 laporan	57 laporan	



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

	<b>JUMLAH</b>	<b>12,787,305,410.66</b>	<b>11,495,551,664.00</b>	<b>1,291,753,746.66</b>				
--	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--	--	--	--

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Cibiru



## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibiru disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

### **Faktor pendukung**

1. Partisipasi dari masyarakat;
2. Peran serta dari aparatur kelurahan dalam mendampingi kegiatan;

### **Faktor Penghambat**

1. Masih adanya pengusulan kegiatan yang kurang tepat sehingga mengalami hambatan dalam pelaksanaan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cibiru, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Perlunya pendampingan dalam pengusulan kegiatan dari aparatur di kelurahan;



# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Cibiru Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.04 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.71 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.787.305.410,66 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.495.551.664,00 dengan





## LKIP 2018 Kecamatan Cibiru

demikian dapat dikatakan tahun 2018 Kecamatan Cibiru Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.291.753.746,66

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.04 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.71 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.787.305.409 (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus sembilan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah 89.90 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Cibiru Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 18 Januari 2019

**CAMAT CIBIRU**



**Drs. AYI SUTARSA**

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 199010 1 001